

ANALISIS PERAN PENDAPATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF BISNIS PARIWISATA UNTUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA (Studi pada Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)

Eka Andini Puspitasari
Yusri Abdillah
Ari Darmawan
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
ekaandinipuspitasari@gmail.com

ABSTRACT

Gubugklakah Tourism Village is a tourism village that has been managed since 2010 by Ladesta Gubugklakah. Gubugklakah village as well as a tourism village that pioneered the application of the concept of sustainable tourism in Indonesia. The development has been done especially tourism infrastructure in expected to have an impact on community's income, so that it can encourage the growth of tourism industry. The aim of this research is focused on the development of tourism infrastructure and community's income based on tourism business perspective. This study seeks to describe and determine the mutual impact the development of tourism infrastructure and community's income generated from tourism activities. The results of this research concluded the development tourism infrastructure at the Gubugklakah Tourism Village quite diverse but not accompanied by good planning and not optimal in cooperation with public and private actor. An increase in people's income from tourism business activities undertaken include a business tourist attraction, tour guide services, travel services, food and beverage services, accommodation and tourism transport organized by Ladesta Gubugklakah, but not optimal in terms of recording income. The development of tourism infrastructure in the Gubugklakah Tourism Village have a mutual impact on the income received by communities based on tourism perspective.

Key word: Development Tourism Infrastructure, Community's Income, Tourism business, Gubugklakah Tourism Village

ABSTRAK

Desa Wisata Gubugklakah merupakan desa wisata yang sudah dikelola sejak tahun 2010 oleh Ladesta Gubugklakah. Desa Wisata Gubugklakah juga sebagai desa wisata yang merintis penerapan konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Pengembangan yang dilakukan khususnya infrastruktur pariwisata diharapkan mampu memiliki dampak terhadap pendapatan masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan industri pariwisata. Tujuan penelitian ini berfokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata dan pendapatan masyarakat dalam perspektif bisnis pariwisata. Penelitian ini juga berusaha mendeskripsikan dampak timbal balik dari pengembangan infrastruktur pariwisata dan pendapatan masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pengembangan infrastruktur pariwisata di Desa Wisata Gubugklakah cukup beragam tetapi tidak disertai perencanaan yang matang dan tidak maksimal dalam kerjasama dengan pemerintah maupun swasta. Terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan bisnis pariwisata yang dilakukan meliputi usaha daya tarik wisata, jasa pramuwisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi dan jasa transportasi pariwisata yang diorganisir oleh Ladesta Gubugklakah, namun belum maksimal dalam hal pencatatan pendapatan. Pengembangan infrastruktur pariwisata di Desa Wisata Gubugklakah memiliki dampak timbal balik terhadap pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam perspektif bisnis pariwisata.

Kata Kunci: Pengembangan Infrastruktur Pariwisata, Pendapatan Masyarakat, Bisnis Pariwisata, Desa Wisata Gubugklakah

PENDAHULUAN

Kabupaten Malang, Jawa Timur berusaha mendongkrak perekonomian masyarakatnya melalui pengembangan infrastruktur pariwisata. Peningkatan tersebut dilakukan mulai dari desa-desa. Kabupaten Malang memiliki 71 desa dengan berbagai dayatarik wisata, tetapi hanya beberapa desa yang masuk ke dalam kategori desa wisata. Salah satu desa wisata tersebut adalah Desa Wisata Gubugklakah.

Pengelolaan pariwisata Desa Wisata Gubugklakah yang dilakukan kurang mendapatkan perhatian oleh berbagai pihak mulai dari Pemerintah Desa sampai Pemerintah Kabupaten. Meskipun begitu, masyarakat telah bisa membuktikan kemandiriannya sejak tahun 2010 tanpa bantuan dari pemerintah Kabupaten Malang. Terbukti dengan wisatawan yang datang ke Desa Wisata Gubugklakah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tahun	Wisnus	Wisman
2011	98	-
2012	1.540	50
2013	3.734	212
2014	5.074	306
2015	5.587	347
Jumlah	16.033	915

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Desa Wisata Gubugklakah menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut adalah kurang memadainya infrastruktur pariwisata, kesenjangan pendapatan antara pelaku bisnis pariwisata, relatif tingginya pengembalian biaya kepada wisatawan yang kecewa akan kualitas infrastruktur serta kurang memadainya masyarakat dalam pencatatan pendapatan dalam berbisnis pariwisata. Selain itu, belum adanya sumber dana yang bisa membiayai pengembangan infrastruktur selain dari swadaya masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya upaya lebih untuk bisa mengelola Desa Wisata Gubugklakah sebagai salah satu desa wisata yang menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Peningkatan jumlah wisatawan yang tidak direncanakan perencanaan pengembangan infrastruktur pariwisata yang matang dan pendapatan dalam berbisnis pariwisata pun tidak terkontrol dengan baik. Alasan tersebut yang telah menarik minat peneliti untuk mengetahui pengembangan infrastuktur pariwisata yang telah

dilakukan serta peran pendapatan dalam kegiatan berbisnis pariwisata untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata yang menunjang kegiatan pariwisata di Desa Wisata Gubugklakah.

KAJIAN PUSTAKA

Pariwisata

Pariwisata adalah proses kegiatan sementara seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya (Suwanto, 2004). Pariwisata sangat erat kaitannya dengan pengembangan. Pengembangan pariwisata adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan secara sadar untuk memperbaiki potensi wisata, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif serta meminimalkan dampak negatif (Yoeti, 2008).

Bisnis Pariwisata

Menurut UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bisnis atau usaha pariwisata adalah usaha menyediakan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Terdapat 13 usaha atau bisnis yang termasuk dalam kategori bisnis pariwisata yaitu: 1) daya tarik wisata; 2) kawasan pariwisata; 3) jasa transportasi wisata; 4) jasa perjalanan wisata; 5) jasa makanan dan minuman, 6) penyediaan akomodasi; 7) penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi; 8) penyelenggara MICE; 9) jasa informasi wisata; 10) jasa konsultan pariwisata; 11) jasa pramuwisata; 12) wisata tirta; 13) spa.

Desa Wisata

Desa wisata adalah produk wisata yang mempunyai keterlibatan dengan masyarakat desa itu sendiri serta segala perangkat yang dimilikinya (Muljadi, 2009). Produk wisata yang dimaksud adalah sebuah kesatuan dari apa yang wisatawan beli dan lakukan di desa wisata serta melibatkan pelayanan yang digunakannya untuk membuat produk tersebut layak dikonsumsi oleh wisatawan (Agustina, 2012). Terdapat lima syarat berdirinya suatu desa wisata yaitu: 1) atraksi wisata; 2) jarak tempuh; 3) beasaran desa; 4) sistem kepercayaan dan kemasyarakatan; 5) ketersediaan infrastruktur (Iriansyah, 2014). Terdapat lima pendekatan pengembangan desa wisata, yaitu: 1) pendekatan lingkungan masyarakat; 2) pendekatan perencanaan fisik; 3) pendekatan terhadap unsur-unsur pariwisata; 4) pendekatan dasar rencana tapak; 5) pendekatan struktur geo-kliatologis (Iriansyah, 2014).

Infrastruktur Pariwisata

Infrastruktur adalah jasa atau layanan mendasar yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kegiatan industri, pertanian serta pembangunan ekonomi lainnya (Hapsari, 2011). Infrastruktur pariwisata adalah infrastruktur yang sama dengan infrastuktur perekonomian pada umumnya karena kegiatan kepariwisataan merupakan salah satu kegiatan perekonomian (Yoeti, 1986). Terdapat tiga sarana kepariwisataan yang mempengaruhi lamanya tinggal wisatawan, yaitu: 1) sarana pokok kepariwisataan; 2) sarana pelengkap kepariwisataan; 3) sarana penunjang kepariwisataan.

Pendapatan

Pendapatan adalah aliran masuk suatu badan usaha selama satu periode yang berasal dari penyerahan pembuatan barang, pemakaian jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan perusahaan yang terbagi menjadi pendapatan operasional dan pendapatan non operasioanal (Baridwan, 2009). Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul akibat penjualan produk dagangan dalam periode tertentu. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang dididapatkan diluar dari kegiatan dagangan, contohnya: pendapatan bunga, penjualan surat berharga.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan serta menganalisis peran pendapatan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pariwisata di Desa Wisata Gubugklakah.

Fokus Penelitian

1. Pengembangan infrastruktur pariwisata di Desa Wisata Gubugklakah sebagai menunjang kegiatan kepariwisataan dalam mendatangkan pendapatan.
2. Pendapatan masyarakat Desa Wisata Gubugklakah untuk meningkatkan infrastruktur yang menunjang kegiatan bisnis pariwisata.

Lokasi Penelitian

Kabupaten Malang adalah lokasi dari penelitian ini.

Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo merupakan situs yang dipilih oleh peneliti.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Ketua Ladesta Gubugklakah, Bendahara Ladesta Gubugklakah, Koordinator *marketing* Ladesta Gubugklakah dan Masyarakat Desa Wisata Gubugklakah. Data sekunder lainnya didapatkan dari arsip, laporan serta dokumen yang diperoleh dari jurnal, buku, *website* ataupun diperoleh langsung dari Desa Wisata Gubugklakah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen paada penelitian ini adalah peneliti, pedoman wawancara, pedoman observasi, perangkat penunjang berupa alat tulis, perekam dan kamera.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dikemukakan oleh Miles Huberman (2013) yaitu reduksi data, penyajian data dan verivikasi data.

Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber karena konteks penelitian terkait dengan beberapa narasumber sehingga keabsahan data bisa diperoleh dengan cara pengecekan data yang diberikan oleh beberapa narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan infrastruktur Pariwisata dalam Mendatangkan Pendapatan

a. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

Kebijakan mengenai pengembangan infrastuktur pariwisata telah ada pada tingkat Kementerian Pariwisata. Kebijakan mengenai pengembangan infrastruktur juga ditemui pada level Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Kebijakan tersebut bisa di temui pada Pencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDa) Kabupaten Malang. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah membuat beberapa program yang berkaitan dengan

pengembangan infrastruktur pariwisata. Sayangnya, kebijakan tersebut belum menjadi prioritas. Saat ini Kabupaten Malang masih menjadikan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas kebijakan. Pada tingkat Pemerintah Desa pun belum ditemui kebijakan mengenai pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur yang dilakukan belum terencana secara matang dan menyeluruh sehingga pemanfaatannya belum optimal.

b. Keanekaragaman Infrastruktur Pariwisata yang Mendatangkan Pendapatan

Ada tiga pengelompokan infrastruktur pariwisata, yaitu sarana pokok pariwisata, sarana pelengkap pariwisata dan sarana penunjang pariwisata. Ketiga pengelompokan infrastruktur tersebut sudah ada di Desa Wisata Gubugklakah. Sarana pokok kepariwisataan di Desa Wisata Gubugklakah berupa jalan raya, drainase, *homestay*, gapura, drainase, kantor lembaga, *rest area*, sistem kelistrikan serta transportasi. Sarana pelengkap kepariwisataan yaitu berupa *water heater*, papan *homestay*, lampu jalan, *extrabed*, tanaman hias dan komputer. Sarana penunjang pariwisata berupa warung dan sentra susu sapi.

c. Kerjasama yang Telah Dilakukan

Desa Wisata Gubugklakah telah berkerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah. Bentuk kerjasama dengan pemerintah pusat berupa PNPM Mandiri pariwisata. Kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah daerah yaitu dalam pengembangan sumberdaya manusia dan upaya promosi pariwisata. Kerjasama dengan investor atau swasta sampai saat ini belum terjalin.

d. Pengembangan Infrastruktur Pariwisata yang Telah Dilakukan

Pengembangan infrastruktur pariwisata di Desa Wisata Gubugklakah memiliki tiga pendekatan, yaitu pendekatan perencanaan fisik, pendekatan terhadap unsur-unsur pariwisata dan pendekatan dasar rencana tapak. Pendekatan perencanaan fisik dilakukan dengan upaya penetapan zonasi area kegiatan wisata, zonasi penentuan

homestay dan membenah sistem air. Pendekatan terhadap unsur pariwisata berupa pemenuhan kebutuhan fasilitas wisatawan seperti akomodasi, tempat ibadah, *rest area*, warung, *flying fox*, *water heater*, jalan raya dan transportasi. Pendekatan rencana tapak yang dilakukan berupa membenah sistem transportasi.

2. Pendapatan Masyarakat Desa Wisata Gubugklakah yang Menunjang Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

a. Pengelolaan Pariwisata yang Melibatkan Masyarakat Desa Wisata

Masyarakat Desa Wisata Gubugklakah telah terlibat secara aktif dalam pengelolaan pariwisata. Keterlibatan tersebut ditandai dengan berdirinya Ladesta dan Pokdarwis Gubugklakah yang beranggotakan masyarakat Desa Wisata Gubugklakah itu sendiri. Pokdarwis berupaya untuk menyadarkan masyarakat akan pariwisata yang berbasis sapa pesona. Setelah masyarakat siap, produk desa wisata akan dipasarkan oleh Ladesta. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam hal kebersihan, juru parkir, administrasi, juru parkir dan menyediakan kios. Pelibatan secara langsung juga bisa dilihat dengan adanya usaha-usaha pariwisata yang ada di Desa Wisata Gubugklakah.

b. Keanekaragaman Usaha atau Bisnis Pariwisata di Desa Wisata

Terdapat beberapa jenis usaha yang terdapat di Desa Wisata Gubugklakah yaitu, usaha daya tarik wisata, jasa pramuwisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan minuman, penyediaan akomodasi dan jasa transportasi wisata. Usaha daya tarik wisata berupa Coban Pelangi, Coban Trisula, kawasan wisata Ledhok, agro wisata pertanian, seni budaya (bantengan, kuda lumping an topeng malangan), dan sentra susu perah Nusa Pelangi. Usaha jasa pramuwisata dan jasa penyediaan perjalanan wisata dikelola oleh Ladesta. Usaha penyediaan akomodasi serta penyediaan makanan dirangkap oleh pemilik *homestay*. Usaha penyediaan transportasi berupa mobil *offroad* serta mobil pribadi pun bisa ditemui di Desa Wisata Gubugklakah. Ditemukan fakta bahwa usaha-usaha tersebut bisa

mendongkrak perekonomian masyarakat melalui pariwisata.

c. Upaya pemerintah dan Masyarakat dalam Mendatangkan Wisatawan

Pemerintah daerah pernah mengikut sertakan Desa Wisata Gubugklakah pada Majapahit *Travel Fair*. Media lain yang dibuat oleh Ladesta adalah membuat brosur, *leaflet*, vcd yang dibagikan ke *travel agent*, hotel dan instansi lain seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Upaya promosi *online* menggunakan media sosial seperti *instagram*, *facebook* dan *ewbsite* juga telah dilakukan. Upaya promosi lain juga dilakukan dalam bentuk kompetisi. Terbukti hingga saat ini Desa Wisata gubugklakah memenangkan berbagai penghargaan. Berbagai upaya promosi telah dilakukan, namun kurang maksimal. Karena belum ada monitoring dan evaluasi terhadap hasil dari kegiatan promosi dan tidak ada perencanaan strategis promosi yang akan dilakukan.

d. Mekanisme Pendistribusian Pendapatan

Ladesta Gubugklakah belum mengenal laporan keuangan, pencatatan pendapatan yang baik. Hingga saat ini hanya dilakukan pencatatan-pencatatan yang seadanya. Pencatatan tersebut dilakukan oleh bendahara Ladesta Gubugklakah. Hal ini menimbulkan masalah ketidaktahuan Ladesta terhadap beberapa item keuangan, seperti sumber pendanaan dari mana saja serta untuk apa saja dana tersebut digunakan. Permasalahan tersebut bisa diatasi apabila bendahara ladesta Gubugklakah bisa memahami dengan baik mengenai laporan keuangan.

e. Infrastruktur Pariwisata yang menunjang Pendapatan Masyarakat

Infrastruktur pariwisata bisa meningkatkan produktifitas. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, sesuai kebutuhan wisatawan serta nyaman digunakan bisa meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat dari kemunculan beberapa kios kecil yang ada di sepanjang jalan utama Desa Wisata Gubugklakah. Selain itu jumlah homestay yang terus meningkat dari tahun ketahun menandakan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menuntut

suatu destinasi untuk memenuhi kebutuhan fasilitasnya, dengan begitu pendapatan juga bisa meningkat. Apabila jumlah homestay tidak meningkat, otomatis kebutuhan wisatawan akan akomodasi tidak bisa terpenuhi dan peningkaytan jumlah kunjungan pun tidak terjadi karena daya tampung Desa Wisata Gubugklakah tidak memadai.

f. Pendapatan Masyarakat yang Mendorong Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

Pemerintah mempunyai andil besar dalam pengembangan, tapi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk turut serta dalam segala jenis pengembangan yang dilakukan termasuk dalam konteks pendanaan dalam pengembangan infrastruktur pariwisata. Sumber pendanaan infrastuktur pasriwisata terbesar di Desa Wisata Gubugklakah berasal dari pendapatan masyarakat dari kegiatan berbisnis pariwisata yang disisihkan. Upaya lain dilakukan dengan menetapkan retribusi untuk bisa disumbangkan ke desa. Tercatat ada Rp 17.500.000 dana yang telah dialokasikan kepada pemerintah desa. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan infrastruktur berdampak positif tentunya dengan tidak perlu berharap sepenuhnya kepada pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kebijakan pengembangan infrastruktur di Desa Wisata Gubugklakah belum ada. Ketersediaan infrastuktur pariwisatanya cukup beragam. Kerjasama yang dilakukan hanya dengan pemerintah dalam hal pengembangan, belum ada upaya kerjasam dengan pihak swasta. Pengembangan infrastruktur pariwisata dilakukan dengan pendekatan perencanaan fisik, pendekatan terhadap unsur-unsur pariwisata dan pendekatan dasar rencana tapak.
2. Masyarakat Desa Wisata Gubugklakah secara aktif terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Promosi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan MTF dan kegiatan lomba serta upaya promosi *offline* dan *online* menggunakan media sosial telah dilakukan. Pencatatan pendapatan kurang baik karena bendahara Ladesta belum memahami laporan keuangan. Infrastruktur dan

pendapatan saling memiliki dampak timbal balik .

Saran

1. Kementerian Pariwisata perlu mengkaji pembuatan pedoman Lembaga Desa Wisata.
2. Dinas pariwisata setempat diharapkan mampu menerapkan kebijakan mengenai pengembangan infrastruktur, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap upaya promosi yang telah dilakukan. Serta memberikan pelatihan secara insentif kepada bendahara Ladesta.
3. Mengoptimisasai peran masyarakat, peran bendahara, serta bisa lebih terbuka dengan pihak swasta.
4. Dilakukan penelitian lanjutan mengenai konteks terkait daya saing bisnis pariwisata di desa wisata, rencana pengembangan infratsruktur desa wisata, upaya pemasaran produk wisata serta laba rugi dalam kegiatan berbisnis pariwisata

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Wiwiek N K. 2012. *Desa Budaya Kertalangu Sebagai Usaha Daya Tarik Wisata di Kota Denpasar*. Denpasar: Universitas Udayana
- Iriansyah A. A. 2014. *Kapasitas Kelembagaan Desa dalam Mengembangkan Desa Wisata*. Malang: Universitas Brawijaya
- Hapsari, Tunjung. 2011. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Yoeti, Oka A. 1986. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa
- Yoeti, Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Muljadi, A.J. 2009. *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem informasi Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: YKPN